



Pemerintah Kabupaten Solok

RENJA 2026

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

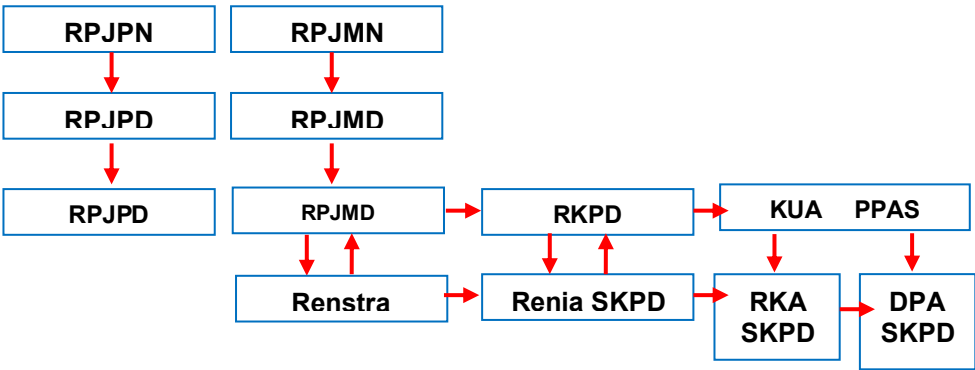
1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah bersifat prediktif dan memuat hal-hal yang fundamental dan krusial yang terdiri dari visi, misi dan arch pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. RPJP Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Solok ini merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Operasional RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, didalamnya memuat Rencana Strategis (Renstra-PD) dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok (Disparbud) Tahun Anggaran 2026 ini memberi gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok dalam Tahun 2026. Penyusunan Renja ini akan diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA-PD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok 2025-2029.

Renja merupakan pedoman perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan PD secara rinci. Renja mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah yang merupakan breakdown dan Renstra-PD selama 5 (lima) tahun. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lain disajikan sebagaimana diagram berikut:

Gambar 1.1.
Gambar: Hubungan Dokumen Rencana Kerja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



Dari bagan alur diatas dapat diuraikan bahwa proses perencanaan dapat dimulai dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk penjabaran teknis RPJMD, disusunlah Renstra- PD sebagai penentu arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5 tahunan. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah RKPD sebagai dokumen yang memuat prioritas program dan kegiatan. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Nagari, kecamatan dan Kabupaten. Berpedoman pada Renstra-PD dan RKPD, maka setiap perangkat daerah akan menyusun rencana kerja tahunan berupa Renja untuk pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra-PD, tujuan dan sasaran serta rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Setelah finalisasi Renja, akan disusun KUA dan PPAS yang berisi uraian program dan kegiatan, indikator sasaran yang ingin dicapai serta besaran pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun RKA yang berisi uraian belanja perkegiatan, sebagai dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD). Guna terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan perangkat daerah dengan rencana tahunan propinsi dan nasional, maka dalam menyusun program dan kegiatan harus berpedoman juga kepad arah dan kebijakan pembangunan propinsi dan nasional.

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Profinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
13. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan Kepariwisata;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Solok Tahun 2013-2026;
17. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja 2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Solok.

Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan. Renja memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2026 adalah untuk merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Secara lebih spesifik, tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Solok;

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan
4. Memberikan pedoman pada pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2026.
5. Sebagai acuan dalam Menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu

Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun n-2) dan Capaian Renstra (Tahun n-1), Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab V Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja .

BAB II
HASIL EVALUASI KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Tahun 2026. Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi dan melebihi hasil/keluaran yang direncanakan serta faktor penyebabnya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan urusan Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2026 sebanyak 2 urusan ,8 program dan 27 sub Kegiatan. Dalam Pelaksanaannya Program/ Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Secara keseluruhan kinerja hasil/ keluaran program dapat dilihat pada tabel 2. 1 berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENT ASE
Urusan Pariwisata dan Kebudayaan		13,410,163,479	11,074,914,439	83
Urusan Kebudayaan		1,640,397,380	1,629,496,563	99
	Program Pengembangan Kebudayaan	858,492,400	850,946,000	99
	- Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupatn/ Kota	858,492,400	850,946,000	99
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Dan Pranata Adat	858,492,400	850,946,000	99
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	741,181,530	739,287,148	100

	- Pembinaan Kesenian Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten Solok/Kota	741,181,530	739,287,148	100
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	741,181,530	739,287,148	100
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	40,723,450	39,263,415	96
	- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	40,723,450	39,263,415	96
	Penetapan Cagar Budaya	40,723,450	39,263,415	96
Urusan Pariwisata		11,769,766,099	9,445,417,876	80
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,956,030,880	3,623,211,028	92
	- Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150,912,826	119,021,612	79
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	150,912,826	119,021,612	79
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,110,044,903	2,818,631,880	91
	Penyedia Gaji Dan Tunjangan Asn	3,110,044,903	2,818,631,880	91
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	164,617,010	164,287,563	100
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2,851,370	2,793,000	98
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,596,109	9,498,225	99
	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	5,655,531	5,485,000	97
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	146,514,000	146,511,338	100
	- Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,193,363	89,197,255	95
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	750,000	750,000	100

	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	91,643,363	86,647,255	95
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,800,000	1,800,000	100
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	436,262,778	432,072,718	99
	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Opsional Atau Lapangan	222,432,550	221,740,150	100
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	41,395,304	41,309,366	100
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	172,434,924	169,023,202	98
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6,144,103,311	4,214,768,403	69
	- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3,266,421,210	1,397,278,101	43
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3,266,421,210	1,397,278,101	43
	- Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	1,674,797,887	1,662,817,714	99
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1,322,480,787	1,313,532,414	99
	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	46,617,100	46,217,300	99
	Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	305,700,000	303,068,000	99
	-Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kot	558,492,896	532,851,048	95
	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	77,189,296	75,685,048	98

	Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	481,303,600	457,166,000	95
	-Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kab/Kota	644,391,318	621,821,540	96
	Pengelolaan Investasi Pariwisata	249,691,918	247,863,440	99
	Pembinaan Dan Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Yang Telah Tersertifikasi Chse (Berdasarkan Permenpar No 13 Tahun 2020 Dan Sni)	530,400	530,400	100
	Sertifikat Standar Usaha Pariwisata Yang Diterbitkan Oleh Lembaga Oss (Tanpa Verifikasi)	12,250,000	3,500,000	29
	Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Solok	381,919,000	369,927,700	97
	Program Pemasaran Pariwisata	1,227,685,308	1,167,731,045	95
	- Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1,227,685,308	1,167,731,045	95
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri	202,803,696	196,074,260	97
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaetn/Kota	920,802,130	879,201,625	95
	Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam Dan Luar Negeri	77,649,432	76,703,360	99
	Peningkatan Kerja Sama Dan Kemitraan Pariwista Dalam Dan Luar Negeri	16,432,100	5,851,800	36
	Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	9,997,950	9,900,000	99

	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	312,873,500	312,159,500	100
	- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	312,873,500	312,159,500	100
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sdm Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	249,439,000	249,160,000	100
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, Dan Pendampingan Eonomi Kreatif	63,434,500	62,999,500	99
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	129,073,100	127,547,900	99
	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif	129,073,100	127,547,900	99

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok tidak menyusun SPM sehingga untuk menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah digunakan indikator sasaran strategis dan indikator kinerja utama perangkat daerah sesuai dengan Renstra-PD Tahun 2025-2029 Kabupaten Solok.

Capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Tabel 2.2 Perkembangan Capaian Indikator

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	13.64	14.52	4.69	21,32	43.36
2	Persentase Pertumbuhan Industri Pariwisata	0	0	0	9.09	13.64
3	persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	0	0	8%	8%	26
4	persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	0	0	0	0	8%
5	Persentase Perluasan Produk Kreatif baik di Pasar Domestik maupun Pasar Ekspor	0	0	0	0	4%
6	persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	0	0	0	0	8%
7	Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi	0	0	0	0	5%

2.3. Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Isu strategis diperoleh dari analisis permasalahan internal dan tantangan serta peluang secara eksternal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan Pembangunan untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut::

Tabel 2.3 Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINASMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan daerah untuk menunjang perekonomian masyarakat		Dorongan perlindungan warisan budaya tak benda sesuai konvensi UNESCO	Banyaknya warisan budaya yang belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara memadai	Tantangan menjaga Eksistensi adat dan nilai budaya lokal ditengah perubahan sosial	Pelestarian budaya lokal dan adat istiadat
Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pariwisata berkelanjutan , dampak perubahan iklim terhadap Destinasi Wisata, Digitalisasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru dalam persaingan destinasi global	Transformasi pariwisata nasional , pemulihan dan ketahanan sektor pariwisata , pengembangan Ekraf daerah, dan Digitalisasi promosi pariwisata serta keterkaitan Pariwisata dengan UMKM	Daya Saing Diferensiasi Destinasi daerah dengan peningkatan promosi dan event daerah	Peningkatan daya saing dan diferensiasi Destinasi daerah dengan meningkatkan kslitsd infrastruktur dan amenities pariwisata,serta pengelolaan dan kelembagaan dengan pengembangan ekonomi kreatif lokal

Kemudian agar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, perlu ditentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat serta program/kegiatan/ subkegiatan untuk menjawab semua permasalahan diatas seperti dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Strategi untuk tujuan dan sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional;
		Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional;
		Penguatan pembangunan infrastruktur transportasi darat dalam mendukung pembangunan pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi sentra agrikultur nasional;
		Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pariwisata;
		Stimulasi pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata,
		Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial
		Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism)
		Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal
		Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry

		pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan
		Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
		Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata)
		Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia
		Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata
		Pengembangan Agrowisata
	Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Penguatan Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif
		Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif
Misi 3 : Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya	Terwujudnya berkebudayaan maju	Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal

Tabel 2.5 Aah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

OPERSIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	KET
-Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam implementasi nilai-nilai agama berlandaskan ABS SBK - Meningkatkan pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Meningkatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal daerah	Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal	

OPERSIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	KET
	Meningkatkan daya saing ekonomi kreatif	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Ekonomi Kreatif	
		Peningkatam pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual	
		Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif	
		Peningkatam pemanfaatan digitalisasi	
		Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix	
		Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya	
		Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif	
		Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif	
	Meningkatkan daya saing pariwisata	Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial	
		Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism)	
		Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal	
		Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	
		Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai	

OPERSIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	KET
		dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	
		Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata)	
		Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia	
		Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata	
		Pengembangan Agrowisata	

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Disparbud merupakan proses penelaahan sistematis untuk memastikan keselarasan dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra), arah kebijakan nasional dan provinsi, serta prioritas pembangunan daerah. Review ini bertujuan untuk menilai konsistensi tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, serta pagu indikatif agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dalam pelaksanaannya, review mencakup evaluasi terhadap ketepatan indikator kinerja, keterukuran target, relevansi program/kegiatan terhadap isu strategis, serta sinkronisasi antar perangkat daerah. Hasil review menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal sebelum dibahas lebih lanjut dalam forum perangkat daerah dan musrenbang, sehingga dokumen perencanaan Disparbud lebih akuntabel, realistis, dan selaras dengan prioritas pembangunan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan proses verifikasi, klarifikasi, dan penilaian terhadap aspirasi atau proposal yang disampaikan masyarakat melalui mekanisme perencanaan partisipatif, seperti Musrenbang, forum

konsultasi publik, atau penyampaian langsung kepada perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan yang diajukan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dalam proses penelaahan, dilakukan pengkajian terhadap kesesuaian usulan dengan dokumen perencanaan (Renstra, dan Renja Perangkat Daerah), kewenangan dan ketersediaan anggaran, lokasi dan sasaran kegiatan, serta dampak dan manfaat yang dihasilkan. Selain itu, diperhatikan pula aspek pemerataan, urgensi, serta potensi sinergi dengan program yang sudah direncanakan.

Hasil penelaahan menjadi dasar dalam menentukan apakah usulan dapat diakomodasi, disesuaikan, digabungkan dengan kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, atau belum dapat diprioritaskan. Dengan demikian, proses ini mendukung perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel serta memastikan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.6 Usulan Aspirasi Masyarakat

N O	TANGGAL USUL	PENGUS UL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMEND ASI KECAMATA N
1	06-01-2025	Nagari Alahan Panjang	Bimtek, dan pendamping an Ekraf	Masih rendahnya SDM Masyarakat dalam mengelola, mengemban gkan dan memajukan usaha pariwisata	Alahan Panjang, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Perangkat Daerah	Direkomendasikan karena sesuai kewenangan Dinas Pariwisata dan Budaya	Prioritas ke 40
2	07-01-2025	Nagari Sungai Jambur	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	kurangnya peningkatan kesinian anak nagari	JORONG KAMPUANG ATEH, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Perangkat Daerah	Direkomendasikan karena sesuai kewenangan Dinas Pariwisata dan Budaya	Prioritas 7
3	07-01-2025	Irfan Fiktono, S.Pd	Pengemban gan Cagar Budaya	Perlunya Pemeliharaa n, Perawatan serta pengembang an Situs-situs Sejarah yang ada di Jorong Pasa Hilia agar selalu terjaga keaslian dan	Balai Lamo, Kolam Duo, Batu Hampar Jorong Pasa Hilia, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Perangkat Daerah	Direkomenasikan	prioritas 8

				kelestariannya.						
4	07-01-2025	Nagari Aie Batumbua k	Peningkatan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Belum ada Peningkatan pendidikan, pelatihan dan peralatan kesenian tradisional	Nagari Aia Batumbua k, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Kecamatan	Direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan SKPD	-
5	08-01-2025	Nagari Gantuang Ciri	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	masih kurang cakupannya tata kelola lembaga kesenian tradisional yang ada di Nagari	Nagari Gantuang Ciri, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Kecamatan	Direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan	-
6	08-01-2025	Joni Putra	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Kurangnya dana untuk pembangunan jalan eko wisata di pemandian air panas jorong tanjuang barisi	Jorong tanjuang barisi, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Perangkat Daerah	Direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan	Prioritas 58

7	08-01-2025	DARWIN DT ENDAH BUNGSU	Peningkatan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Agar tersalurkan dan berkembang bakat dan kesenian di nagari guguk sarai	Nagari Guguk sarai, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Perangkat Daerah	Direkomendasikan, karena sesuai dengan kewenangan SKPD	Prioritas 7
8	09-01-2025	RIZAL IDZEKO	Pengembangan Cagar Budaya	Terjadinya kerusakan dan pelapukan	Jorong Bansa Nagari Gauang, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Kecamatan	Direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan	-
9	10-01-2025	YURDAM. SE	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata an bagi masyarakat, guru dan pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	perlunya pelatihan bagi pergerakan wisata seperti masyarakat, pokdarwis, siswa serta guru yang ada di Nagari Tanjung Alai untuk pengembangan wisata yang ada di nagari	Nagari Tanjung Alai, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Perangkat Daerah	Direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan	Perioritas 8
10	10-01-2025	NAGARI SURIAN	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata an bagi masyarakat, guru dan	Belum adanya SDM Pengelola kepariwisataan yang terlatih	Nagari Surian, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Perangkat Daerah	Direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan	Prioritas 24

			pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)							
11	11-01-2025	Nagari Koto Gadang Guguak	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Dibutuhkan Infrastruktur yang memadai agar pengembang an Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat tercapai dengan baik	Nagari Koto Gadang Guguk, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Kecamata n	Direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan	-
12	13-01-2025	Delfi. S Sos I	Pembinaan SDM Lembaga dan Pranata Adat	kurang nya sdm tentang pemahaman kelembagaan adat	sungai nanam, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Perangkat Daerah	Direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan	Prioritas ke 13
13	13-01-2025	Delfi. S Sos I	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	minimnya pengetahuan tentang tatakelola lembaga keseniang yang ada dinagari	sungai nanam, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Perangkat Daerah	Direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan	Prioriyas ke 21
14	14-01-2025	H. MASRI BAKAR . S.E	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga	kurang maksimal pengelolaan SDM	nagari sumani, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Perangkat Daerah	direkomendasikan	Periritas 10

			Kesenian Tradisional							
15	18-01-2025	ADESRIZ AL	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	terbatasnya pelatihan, kurangnya fasilitas, dan belum adanya peraturan yang Jelas tentang Kesenian Tradisional Nagari	Sungai Durian, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Perangkat Daerah	direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan SKPD	Prioritas 9
16	20-01-2025	Aldimes Rosya	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kesenian Tradisional Nagari sudah mulai terlupakan karena minimnya pengelolaan	Kelompok Kesenian se-Nagari Lolo, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Perangkat Daerah	direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan SKPD	Prioritas 15
17	20-01-2025	Joni Martias, B.Sc	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	DAM Penahan Jalan Tikalak-Jambu Banyak yang Longsor Sehingga Badan Jalan Banyak yang Anjlok.	Gelanggan sampai Parigi Jorong Tengah Nagari Tikalak, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dikembalikan	Kantor KAN merupakan kewenangan Nagari, jadi pembiayaan menggunakan anggaran Nagari	-

18	20-01-2025	Joni Martias, B.Sc	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi masyarakat, guru dan pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pelaku Pariwisata di Nagari Tikalak Belum Cukup Memiliki Pengetahuan Mengenai Pariwisata yang Sesuai Kebutuhan Atau Permintaan Pasar Terkini	Nagari Tikalak, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Perangkat Daerah	Direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan	Perioritas 4
19	23-01-2025	Nagari Bukik Kandung	Pembinaan SDM Lembaga dan Pranata Adat	Masih kurangnya SDM Lembaga Adat di Nagari Bukit Kandung	Balai- balai Adat Nagari Bukit Kandung Jorong Sopan Balai, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Kecamatan	Direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan SKPD	-
20	23-01-2025	Nagari Bukik Kandung	Pembinaan SDM Lembaga dan Pranata Adat	Masih Kurangnya SDM Lembaga Adat Nagari Bukit Kandung	Balai- balai Adat Nagari Bukit Kandung Jorong Sopan Balai, Kab. Solok	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Verifikasi Kecamatan	Direkomendasikan karena sesuai dengan kewenangan SKPD	-

B III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka penelaahan atas rencana strategis yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai acuan untuk bidang pariwisata yang ada di Kabupaten Solok, arah rencana strategis pengembangan pariwisata Indonesia. Secara umum berusaha untuk melakukan penguatan ekonomi kreatif pada tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia dengan harapan hal ini mampu mewujudkan produk unggulan pariwisata di masing-masing daerah. Cara untuk mewujudkan arah pembangunan strategi dilakukan dengan mendorong seluruh warga masyarakat untuk turut andil dalam menciptakan ekonomi kreatif yang memiliki daya saing dan ciri khas sehingga mampu menjadi ikon-ikon baru pariwisata.

Sedangkan berdasarkan penelaahan atas rencana strategis yang dimiliki oleh Kementerian yang membawahi urusan budaya, berfokus pada pelestarian terhadap kebudayaan Indonesia dengan melakukan berbagai tindakan antara lain peningkatan sistem informasi kebudayaan, peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelestarian budaya, penyediaan dana serta penguatan tata kelola yang artinya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran Renja didasarkan atas rumusan tujuan dan sasaran Renstra serta rumusan isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. dan sasaran merupakan penjabaran dari sebuah tujuan yang akan dicapai dan bersifat spesifik oleh instansi pemerintah yang terinci dan terukur yang mempunyai jangka waktu tertentu yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan yang merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategis, dimana sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui Tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tabel 3.1 Penetapan Target indikator tujuan sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN		KET
			2025	2026	
Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal		Cakupan Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum dan Ekonomi Kreatif (%)	2,25	2,26	
		Indek kemajuan kebudayaan (Indeks (Skala 0-100))	1,41	1,93	
	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,11	1,13	
	Meningkatnya Kualitas Ekonomi Kreatif	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,14	1,13	
	Terwujudnya berkebudayaan maju	persentase pembangunan kebudayaan (%)	80	80	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,15	73,65	

3.3 Program menurut sasaran dan indikator

Rumusan program/kegiatan/ sub kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan untuk mensukseskan visi kepala Daerah dalam rangka “***Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera***”. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengemban misi 3 dan 4. Misi 3 “***Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya***”, Sedangkan misi 4 “***Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari***”. Berikut penempatan Program menurut sasaran dan indikator sesuai target yang ditetapkan.

Tabel 3.2 penetapan Program menurut sasaran dan indikator

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	URUSAN / PROGRAM
1	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal		Cakupan Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum dan Ekonomi Kreatif (%)	2,26	Urusan Pariwisata
			Indek kemajuan kebudayaan (Indeks (Skala 0-100))	1,93	Urusan Kebudayaan
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,13	Program Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata
		Meningkatnya Kualitas Ekonomi Kreatif	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,13	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Terwujudnya berkebudayaan maju	persentase pembangunan kebudayaan (%)	80	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,65	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2026 sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok yang berikan Program dan Kegiatan serta pagu indikatif

Dokumen Renja Perangkat daerah tahun 2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Mengingat keterbatasan anggaran pelaksanaab program dan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja tahu 2026 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperluk keterpaduan dan sinergi dari elemen yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan baik sekretariat maupun bidang. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2026.

Tabel 4.1 Program Dan Kegiatan Disparbud Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahu 2027

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUT COME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN				KETERANGAN
		2026		2027		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			100.000.000,00		800.000.000,00	
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100.000.000,00	100	800.000.000,00	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00		800.000.000,00	
Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	40	100.000.000,00	40	800.000.000,00	
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	45		50		
	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	58		60		
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	15		20		
	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	3		4		
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			0,00		0,00	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	15	0,00	20	0,00	
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			100.000.000,00		800.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	45	100.000.000,00	50	800.000.000,00	
2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	3	0,00	4	0,00	
2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan			0,00		0,00	
Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	40	0,00	40	0,00	
2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan			0,00		0,00	
Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	58	0,00	60	0,00	
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			100.000.000,00		600.000.000,00	
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan/Dilestarikan (%)	70	100.000.000,00	80	600.000.000,00	

2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00		600.000.000,00	
Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam kesenian	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	50	100.000.000,00	50	600.000.000,00	
	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	60		70		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50		50		
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			0,00		0,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50	0,00	50	0,00	
2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			0,00		0,00	
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	50	0,00	50	0,00	
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			100.000.000,00		600.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	60	100.000.000,00	70	600.000.000,00	
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			10.000.000,00		10.000.000,00	
meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	30	10.000.000,00	35	10.000.000,00	
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1		1		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	0		1		
2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	1	0,00	1	0,00	
2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			0,00		0,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	0	0,00	1	0,00	
2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			55.000.000,00		55.000.000,00	
meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	20	55.000.000,00	25	55.000.000,00	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	15		20		
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			55.000.000,00		55.000.000,00	
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	15	55.000.000,00	15	55.000.000,00	
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	90		90		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	15		25		
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			0,00		0,00	
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	90	0,00	90	0,00	
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya			55.000.000,00		55.000.000,00	
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	15	55.000.000,00	25	55.000.000,00	
2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda			0,00		0,00	
Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	15	0,00	15	0,00	
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Terlaksananya pengelolaan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	10	0,00	10	0,00	
	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	10		10		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	10		10		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	10		10		
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya			0,00		0,00	
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	10	0,00	10	0,00	
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya			0,00		0,00	
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	10	0,00	10	0,00	
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya			0,00		0,00	
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	10	0,00	10	0,00	
2.22.05.2.02.0004 - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan			0,00		0,00	
Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	10	0,00	10	0,00	
2.22.05.2.03 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
terlaksananya Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek)	0	0,00	1	0,00	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan)	0		1		

2.22.05.2.03.0001 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek)	0	0,00	1	0,00	
2.22.05.2.03.0002 - Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan)	0	0,00	1	0,00	
meningkatnya tata kelola museum	Pesentase kunjungan wisatawan ke museum (%)	0	10.000.000,00	10	10.000.000,00	
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			10.000.000,00		10.000.000,00	
terkelolanya museum di kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	
	Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan)	0		0		
	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang)	1		1		
	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	1		1		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	0		0		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	0		0		
	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)	0		0		
	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	0		0		
2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			0,00		0,00	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	0	0,00	0	0,00	
2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman			0,00		0,00	
Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	0	0,00	0	0,00	
2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			0,00		0,00	

Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	0	0,00	0	0,00	
2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			0,00		0,00	
Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	0	0,00	0	0,00	
2.22.06.2.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum			0,00		0,00	
Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)	0	0,00	0	0,00	
2.22.06.2.01.0014 - Pengelolaan Operasional Museum			0,00		0,00	
Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan)	0	0,00	0	0,00	
2.22.06.2.01.0015 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum			0,00		0,00	
Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang)	1	0,00	1	0,00	
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			5.518.501.922,00		6.882.163.281,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.383.501.922,00		4.367.163.281,00	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	4.383.501.922,00	100	4.367.163.281,00	
3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			309.463.939,00		285.183.798,00	
Tercapai Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	309.463.939,00	1	285.183.798,00	
3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			309.463.939,00		285.183.798,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	309.463.939,00	1	285.183.798,00	
3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.179.684.544,00		3.179.545.333,00	
Terpenuhinya Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	3.179.684.544,00	31	3.179.545.333,00	
3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.179.684.544,00		3.179.545.333,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	3.179.684.544,00	31	3.179.545.333,00	
3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,00		0,00	
Terpenuhinyan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0,00	1	0,00	
3.26.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0,00	1	0,00	
3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			395.967.676,00		396.199.287,00	

Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	395.967.676,00	1	396.199.287,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		
3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.862.015,00		1.900.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.862.015,00	1	1.900.000,00	
3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.546.859,00		9.546.859,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	9.546.859,00	1	9.546.859,00	
3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.706.504,00		8.800.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.706.504,00	1	8.800.000,00	
3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			9.546.859,00		9.646.989,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	9.546.859,00	1	9.646.989,00	
3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			366.305.439,00		366.305.439,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	366.305.439,00	1	366.305.439,00	
3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00		0,00	
terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0,00	1	0,00	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		1		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		1		
3.26.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			0,00		0,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0,00	1	0,00	
3.26.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0,00	0	0,00	
3.26.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00		0,00	

Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0,00	1	0,00	
3.26.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00		0,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0,00	1	0,00	
3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105.234.863,00		105.234.863,00	
Terpenuhinya jasa komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	105.234.863,00	1	105.234.863,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		
3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			103.434.863,00		103.434.863,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	103.434.863,00	1	103.434.863,00	
3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.800.000,00		1.800.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	
3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			393.150.900,00		401.000.000,00	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	393.150.900,00	8	401.000.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11		11		
3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			175.150.900,00		176.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	175.150.900,00	8	176.000.000,00	
3.26.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			40.000.000,00		45.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	
3.26.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			178.000.000,00		180.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11	178.000.000,00	11	180.000.000,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			200.000.000,00		900.000.000,00	

meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	25	200.000.000,00	26	900.000.000,00	
	persentase pertumbuhan industri pariwisata (%)	22,73		27,27		
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			95.000.000,00		446.000.000,00	
Terkelolanya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	40	95.000.000,00	40	446.000.000,00	
	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3		3		
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3		3		
	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		
3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			47.500.000,00		223.000.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3	47.500.000,00	3	223.000.000,00	
3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3	0,00	3	0,00	
3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	0,00	1	0,00	
3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	40	0,00	40	0,00	
3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			47.500.000,00		223.000.000,00	
Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	47.500.000,00	1	223.000.000,00	
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			95.000.000,00		446.000.000,00	
Terkelolanya kawasan strategis pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis	40	95.000.000,00	40	446.000.000,00	

	Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)					
	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		3		
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	3		3		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3		3		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		
3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			47.500.000,00		223.000.000,00	
Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	47.500.000,00	3	223.000.000,00	
3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0,00	1	0,00	
3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	3	0,00	3	0,00	
3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3	0,00	3	0,00	
3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			47.500.000,00		223.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	40	47.500.000,00	40	223.000.000,00	
3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00		0,00	

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	0,00	1	0,00	
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			3.000.000,00		3.000.000,00	
terkelolanya destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	3		3		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota (Dokumen)	1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3		3		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3		3		
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3		3		
3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			3.000.000,00		3.000.000,00	
Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	
3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0,00	1	0,00	
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3	0,00	3	0,00	
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	0,00	3	0,00	

	yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)					
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	0,00	1	0,00	
3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3	0,00	3	0,00	
3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota (Dokumen)	1	0,00	1	0,00	
3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	0,00	1	0,00	
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			7.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersektifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	3	7.000.000,00	3	5.000.000,00	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	1		1		
3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersektifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota			7.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersektifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersektifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	3	7.000.000,00	3	5.000.000,00	
3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota			0,00		0,00	
Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	1	0,00	1	0,00	
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			410.000.000,00		490.000.000,00	
meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	15	410.000.000,00	20	490.000.000,00	

3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			410.000.000,00		490.000.000,00	
Terlaksananya pemasaran pariwisata yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan destinasi wisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	1	410.000.000,00	1	490.000.000,00	
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1		1		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1		1		
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			23.012.783,00		62.778.621,00	
Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	23.012.783,00	1	62.778.621,00	
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			1.051.135,00		2.987.783,00	
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1.051.135,00	1	2.987.783,00	
3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			20.000.000,00		38.723.136,00	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	1	20.000.000,00	1	38.723.136,00	
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			270.936.082,00		280.510.460,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1	270.936.082,00	1	280.510.460,00	
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			95.000.000,00		105.000.000,00	
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	1	95.000.000,00	1	105.000.000,00	
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			200.000.000,00		800.000.000,00	

meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	15	200.000.000,00	20	800.000.000,00	
	Persentase perluasan produk kreatif baik di pasar domestik maupun pasar ekspor (%)	6		7		
3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00	
Tersedianya prasarana kreatif di Kabupaten Solok	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	1	0,00	2	0,00	
3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif			0,00		0,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	1	0,00	2	0,00	
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			200.000.000,00		800.000.000,00	
Terbentuknya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	0	200.000.000,00	1	800.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen)	0		1		
	Jumlah terlaksanakanya pendukunguan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	3		3		
	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	4		4		
3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah			100.000.000,00		400.000.000,00	
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	4	100.000.000,00	4	400.000.000,00	
3.26.04.2.02.0015 - Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual			0,00		0,00	
Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen)	0	0,00	1	0,00	
3.26.04.2.02.0017 - Pendukunguan Pemasaran Ekonomi Kreatif			100.000.000,00		400.000.000,00	
Terlaksanakanya pendukunguan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukunguan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	3	100.000.000,00	3	400.000.000,00	
3.26.04.2.02.0022 - Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual			0,00		0,00	
Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	0	0,00	1	0,00	

3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			325.000.000,00		325.000.000,00	
meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi (%)	15	325.000.000,00	20	325.000.000,00	
	persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi (%)	15		20		
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			325.000.000,00		325.000.000,00	
Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	325.000.000,00	1	325.000.000,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	40		40		
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	120		120		
3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			162.500.000,00		162.500.000,00	
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	120	162.500.000,00	120	162.500.000,00	
3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			162.500.000,00		162.500.000,00	
Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	40	162.500.000,00	40	162.500.000,00	
3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			0,00		0,00	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	0,00	1	0,00	
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			0,00		0,00	
terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	40	0,00	40	0,00	
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			0,00		0,00	
Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	40	0,00	40	0,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja perangkat daerah ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, diharapkan semua pihak terlihat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan berpedoman dan berpijak kepada Renja ini, sehingga arah pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Mengingat akan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, adakalanya rencana kerja yang sudah tertuang ke dalam Renja tidak dapat direalisasikan. Sehingga hasil Renja perlu dilakukan evaluasi untuk target capaiannya. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terlaksana bisa dicarikan sumber pendanaan yang lain seperti APBD pusat, APBD Provinsi maupun dari pihak swasta.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang ke dalam Renja 2026, perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat sehingga hasilnya dapat sesuai dengan sasaran. Hal ini bisa dilakukan melalui rapat kerja bulanan sehingga dapat dijadikan sebagai monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tersebut.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pihak di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok

Arosuka, Desember 2025

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN


MARCOS SOPHAN, S. Pt, M. Si
Nip. 197403141999031006